

# Pembangunan yang Menyelamatkan: Optimalkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas<sup>1</sup>

Nasfryzal Carlo<sup>2</sup>

## 1. Pendahuluan

Pembangunan bersifat multidimensi dimana perubahan direncanakan, diupayakan dan diharapkan berhasil di banyak aspek seperti ekonomi, struktur sosial, pendidikan, infrastruktur, budaya hingga institusi. Karena bersifat multidimensi, maka proses pembangunan dijalankan oleh multipihak: pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil hingga dukungan organisasi asing. Dalam konteks kesejahteraan umum dan pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UURI no. 32/2009). Tetapi dalam kenyataannya, pembangunan yang sudah dilakukan belum sepenuhnya mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa (Pembukaan UUD NRI 1945). Proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengoperasian seringkali tidak optimal, maka pada akhirnya masih menyisakan masalah-masalah hingga terjadi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan bencana bagi masyarakat.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UURI no. 24/2007).

Kejadian bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan kejadian lainnya semakin sering dirasakan dan tidak hanya membawa kerusakan dan kerugian tetapi juga korban jiwa. Perlu disadari bahwa bumi Indonesia adalah daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi karena dipengaruhi oleh letak geografis. Oleh sebab itu, harus dihindari keadaan dimana pembangunan justru meningkatkan kerentanan warga dan bahkan mungkin menurunkan kapasitas kemampuan warga dalam mengatasi keadaan yang membahayakan (Forum 2045, 2021). Salah satu upaya untuk membangun yang menyelamatkan adalah dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengurangan risiko berbasis komunitas. Pengurangan risiko berbasis komunitas/masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama dengan memanfaatkan sumberdaya lokal demi keberlanjutannya (Perka BNPB No. 1, 2012).

## 2. Indonesia dan Rawan Bencana

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis mempunyai potensi terjadinya bermacam-macam bencana (*multi hazard*) dengan risiko tinggi (IRBI, 2013). Adanya *Megathrust* di beberapa tempat di Indonesia seperti *Sunda Megathrust* dan *Mentawai Megathrust* pada setiap saat mengancam masyarakat di

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Simposium Nasional Memajukan Kesejahteraan Umum: Pembangunan yang Menyelamatkan, 8 April 2021 (*on line*).

<sup>2</sup> Ketua PSL Universitas Bung Hatta/Ketua FPTPRB Sumbar/Ketua DPN Pastali

kawasan tersebut. Oleh karena posisi Indonesia yang merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Lempeng Pasific. Zona pertemuan Lempeng Indo Australia dengan Lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan Pasifik di utara Papua dan Maluku Utara. Aktivitas tektonik yang terjadi pada pertemuan lempeng tersebut menimbulkan gunung api disepanjang pulau Sumatera, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Utara Sulawesi-Maluku, hingga Papua. Gunung api tersebut memicu banyaknya patahan aktif dan sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi yang besar dengan episentrum berada dalam laut sering diikuti oleh tsunami.

Menurut *United Nations International Strategis for Disaster Reduction (2014)*, Indonesia merupakan negara yang paling rawan bencana alam di dunia. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia- BNPB (IRBI, 2013), lebih dari 15.000 kejadian bencana pada periode tahun 2005-2015 sekitar 78% (11.648) kejadian bencana merupakan bencana hidrometeorologi dan hanya sekitar 22% (3.810) merupakan bencana geologi. Kejadian bencana kelompok hidrometeorologi berupa kejadian bencana banjir, gelombang ekstrem, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca esktrim. Kelompok ini sebagian besar dapat diprediksi dan bahkan dapat dicegah sebelum terjadi. Sementara bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, merupakan bencana geologi, tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, namun masih dapat diminimalisir korban jiwa akibat bencana ini. Bencana geologi berupa tanah longsor masih dapat diprakiraan bakal terjadi kecuali ikutan dari bencana gempa bumi, letusan gunung api. Kecenderungan jumlah kejadian bencana secara total untuk kedua jenis kelompok ini relatif terus meningkat sehingga makin banyak kawasan menjadi rawan bencana.

Beberapa bencana besar dapat dicatat diantaranya bencana gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004, letusan gunung api di Yogyakarta (2006), gempa bumi di Sumatera Barat (2009), gempa dan tsunami Mentawai (2010), gempa bumi di Lombok disusul gempa bumi dan tsunami di Palu (2018). Bencana besar lainnya seperti banjir yang hampir setiap tahun melanda ibu kota Jakarta, banjir Wasior (2010) dan banjir Sentani (2019) di Papua, banjir yang tidak pernah diperkirakan terjadi di Bandung (2016), banjir Belitung (2017), dan terakhir Banjir di Kalsel di awal 2021, telah menimbulkan kerugian material dan non material termasuk jiwa manusia.

Dibalik luasnya NKRI ini, teridentifikasi seringnya terjadi peristiwa bencana yang menimbulkan korban jiwa pada daerah rawan bencana. Jika terjadi bencana yang paling sering menderita adalah masyarakat miskin dan kaum marjinal yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut. Mereka adalah pihak yang paling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal dari kelompok ini dan pemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana sebagian besar akan menimpa mereka.

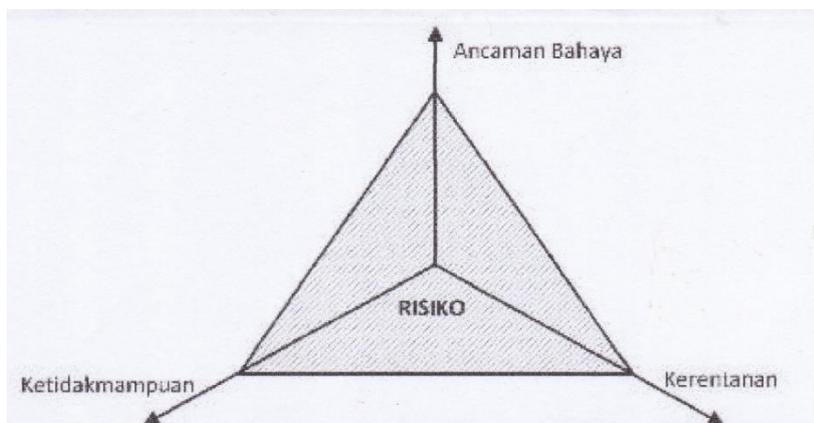
Mengingat korban terbesar dari bencana adalah kaum miskin di tingkat masyarakat dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Program tersebut dapat mempengaruhi masyarakat serta sistem sosialnya untuk ikut serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola ancaman yang terjadi.

### **3. Pengurangan Risiko Bencana**

Prinsip dalam penanggulangan bencana tercantum pada pasal 2 UURI nomor 24 tahun 2007 adalah cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, serta non diskriminatif.

Paradigma pengurangan risiko bencana merupakan rencana terpadu yang bersifat sektor dan lintas wilayah serta meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan (Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008). Untuk mengurangi risiko diperlukan bagaimana mengurangi

ancaman dan kerentanan yang dimiliki serta meningkatkan kapasitas/kemampuan masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman. Hubungan ketiganya digambarkan dengan sebuah segitiga sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1: Hubungan bahaya, kerentanan, dan risiko bencana (Yuspida, 2014)

Gambar 1 menunjukkan bahwa kerentanan, merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Tingkat kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya korban bencana, karena bencana baru akan terjadi bila "bahaya" terjadi pada "kondisi yang rentan". Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, dan ekonomi.

Risiko bencana merupakan interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat tetap karena bagian dari dinamika proses alami pembangunan atau pembentukan permukaan bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal, sedangkan tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut semakin meningkat.

Untuk itu Risiko Bencana Indonesia/RBI (2016), menyebutkan bahwa risiko, bahaya dan kerentanan dapat dihubungkan melalui persamaan:

$$\text{Risiko (R)} = f(\text{Bahaya (H)} \times \text{Kerentanan (V)} / \text{Kapasitas (C)})$$

Dimana: R adalah risiko (*Risk*),  
H adalah bahaya (*hazard*)/potensi bencana,  
V adalah kerentanan (*vulnerability*),  
C adalah kapasitas.

Persamaan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat (kapasitas), maka semakin kecil risiko yang dihadapinya. Oleh sebab itu meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan relatif lebih mudah dibandingkan dengan mengurangi/memperkecil bahaya.

Kapasitas dapat ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagaimana diharapkan pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007. Penglibatan masyarakat pada pra-bencana (ketika tidak ada bencana) menjadi perhatian karena pada waktu ini pengurangan risiko dapat dilakukan.

Penglibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana sering disebut dengan pengurangan bencana berbasis komunitas. Prinsip pengurangan bencana berbasis komunitas adalah mengurangi dampak bencana pada/bagi masyarakat atau pada/bagi pembangunan berkelanjutan. Komponen utama pengurangan risiko berbasis masyarakat (Maarif, 2019) adalah: (1) membangun kesadaran; kesadaran tentang risiko, kesadaran penilaian risiko, (2) mengembangkan pengetahuan; melalui pendidikan penelitian, pelatihan dan informasi, (3) komitmen kebijakan, kelembagaan dan kerangka kelembagaan berupa organisasi, kebijakan, legislasi dan aksi komunitas, (4) penerapan kaedah-kaedah standar berupa pengelolaan lingkungan, daya dukung daya tampung lingkungan, perencanaan perkotaan, perlindungan fasilitas sosial, penerapan iptek, kemitraan dan instrument keuangan, (5) peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat, dengan hak masyarakat berupa hak mengetahui, hak untuk memikirkan, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, dan hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks Paradigma Nasional**

Membangun kesadaran dan mengembangkan pengetahuan masyarakat sering disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Benson dan Twigg (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan merupakan upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Masyarakat diberdayakan secara optimal sehingga mereka mempunyai kekuatan dalam menghadapi bencana. Pemberdayaan akan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bila terjadi bencana (Carlo, 2017). Oleh sebab itu dukungan kebijakan dan finansial dari pemerintah harus semakin kuat.

Pemberdayaan masyarakat harus dilihat secara komprehensif baik dari paradigma nasional maupun secara internasional. Paradigma nasional yang digariskan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupa satu kesatuan yang utuh berupa nilai-nilai yang harus diimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Persamaan hak dan kewajiban dari sila kedua serta kegotong royongan (sila ke 5) sangat relevan. Prinsip kebersamaan dan kegotong royong dimaksud diyakini akan mampu meringankan risiko ancaman berbagai jenis bencana (terutama bencana alam).

Pemberdayaan yang dilakukan harus mengacu kepada pasal 27 dan 28 UU NRI 1945 sebagai landasan konstitusional. Tidak kalah penting pemberdayaan juga harus mengacu kepada wawasan nusantara sebagai landasan visional dan ketahanan nasional sebagai landasan konseptual (Carlo, 2017).

Ketahanan Nasional Indonesia merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman dan potensi ancaman yang akan terus berlangsung adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berujung terjadinya bencana. Rentetan ancaman dan kejadian bencana dimaksud, tidak terlepas dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dunia (saat ini telah mendekati 8 milyar jiwa). Pertambahan penduduk akan mengintervensi sumber daya alam secara berlebihan. Eksploitasi sumber daya alam akan terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga beberapa kawasan tidak lagi mampu mendukung dan daya tampung yang terus berkurang sehingga akan menimbulkan bencana.

Dalam konsep kebencanaan dikenal tiga siklus bencana yaitu pada tahap kesiapsiagaan, tahap masa darurat, dan tahap pasca bencana. Dalam hal ancaman bencana alam, masyarakat yang tangguh bencana akan dapat mengurangi risiko bencana sehingga mereka menjadi tangguh ketika terjadi bencana. Tangguh bencana akan meningkatkan ketahanan nasional yang pada akhirnya akan mampu menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan aman.

## **5. Pemberdayaan masyarakat pada Daerah Rawan Bencana**

### **5.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks Desa Tangguh**

Pemberdayaan dalam konteks desa tangguh untuk memperkuat masyarakat lokal terhadap bencana telah dilaporkan oleh Carlo et al. (2015), Carlo et al. (2016), Paripurno dan Nugroho (2016), dan Budianto (2017). Carlo et al. (2015), telah melakukan pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan bencana di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Nagari adalah sebutan Desa di provinsi Sumatera Barat) melalui pendidikan dan pelatihan dengan metoda PRA (*Participatory Rural Apparisa*) pada tahun 2014. Hasilnya, telah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mereka terhadap pengetahuan ancaman dan dampak bencana khususnya ancaman letusan Gunung Talang. Hasil rembuk warga berhasil membentuk kelompok siaga bencana pada 8 jorong yang ada dan KSB (Kelompok Siaga Bencana) berhasil mengidentifikasi aksi komunitas guna mengurangi ancaman bencana gunung meletus. Aksi komunitas tersebut dilakukan secara bersama oleh masyarakat itu sendiri. Antusias masyarakat menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap ancaman bencana, walaupun hasil evaluasi Budianto (2017), menunjukkan bahwa capaian terhadap keberhasilan desa tangguh hanya 12 dari 20 indikator. Hal disebabkan proses pemberdayaan tidak berlangsung secara kontinu karena keterbatasan biaya dan fasilitator sehingga partisipasi masyarakat menjadi berkurang dan aksi komunitas menjadi terhenti.

Dua tahun berikutnya, Carlo et al. (2016) melakukan pemberdayaan masyarakat rentan bencana di nagari Salayo dengan metoda yang sama dengan Nagari Batu Bajanjang. Nagari Salayo terancam oleh banjir bandang dan angin puting beliung. Di nagari Selayo KSB terkenal sebagai KSB terbaik di Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana. Hal ini tercemin ketika terjadi bencana banjir, masyarakat setempat dibawah koordinasi KSB berhasil dengan cepat mengevakuasi masyarakat yang terkena banjir dan menyiapkan dapur umum secara baik. Ini menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat setempat meningkat dalam menghadapi bencana. Partisipasi masyarakat terus terjaga karena KSB yang terbentuk sering mengadakan rembuk warga dan melakukan simulasi dengan dukungan dana dari hasil usaha dari KSB tersebut.

Pada tempat lain Paripurno dan Nugroho (2016) melakukan penguatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman Gunung Kelut di Jawa Timur tahun 2010-2013, menunjukkan keberhasilan. Hal ini terbukti ketika Gunung Kelut meletus tahun 2014, kapasitas masyarakat di sekitar Gunung Kelut dinilai berhasil memenuhi unsur peringatan utama berupa (i) pengetahuan risiko masyarakat meningkat, (ii) kemampuan dan pelayanan peringatan, (iii) penyebaran dan komunikasi, serta (iv) kemampuan merespon sangat baik.

### **5.2 Kendala Pencapaian Indikator Desa Tangguh.**

Kendala dalam pencapaian indikator desa tangguh terhadap proses pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana terlihat dari hasil evaluasi pada empat nagari tangguh yang ada di Sumatera Barat (Carlo, 2017). Pencapaian terbaik hanya diperoleh oleh Nagari Tiku Selatan ditetapkan sebagai nagari tangguh utama, dan tiga nagari lain meraih peringkat tangguh pratama (Nagari Tiku V Jorong, Nagari Batu Bajanjang dan Nagari Salayo). Ada dua nagari (Tiku Selatan dan Tiku V Jorong) yang ditetapkan dalam waktu bersamaan dengan dukungan dana yang juga sama, namun memperoleh hasil yang berbeda. Ternyata diakibatkan oleh tingkat ekonomi masyarakat dan letak geografis yang berbeda. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam (hasil wawancara, 2018) bahwa Nagari Tiku Selatan lebih diuntungkan karena secara geografis merupakan ibu kota Kecamatan Tanjung Mutiara sehingga tingkat ekonomi masyarakatnya lebih baik dibandingkan masyarakat yang berada di Nagari Tiku V Jorong. Selain itu, adanya fasilitator yang mendampingi masyarakat Nagari Tiku Selatan. Kondisi ini dibenarkan oleh Bupati Agam (hasil wawancara, 2018) bahwa masyarakat yang ekonominya rendah lebih

memilih pekerjaan yang menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada aktif melakukan kegiatan program desa tangguh.

Pada dua nagari lagi mempunyai peringkat yang sama dengan ancaman yang berbeda. Nagari Batu Bajanjang rentan terhadap ancaman bencana gunung meletus dan Nagari Salayo rentan dengan ancaman bencana banjir. Kedua nagari ini telah dijadikan tempat KKN tematik mahasiswa Universitas Bung Hatta untuk mempercepat menjadi nagari tangguh bencana (Carlo et al. 2015 dan Carlo et al. 2016). Namun kenyataannya belum mencapai indikator keberhasilan sebagai nagari tangguh. Kendala utama adalah pelaksanaan program dan atau aksi komunitas tidak dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan), kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah setempat dan program nagari tangguh belum menjadi skala prioritas. Disamping itu, KSB yang terbentuk belum mampu mendapatkan dukungan finansial secara swadaya akibat keterbatasan ekonomi masyarakat serta kurangnya penggerak (fasilitator).

### **5.3 Optimalkan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Bencana dan Kebijakan Lingkungan lainnya**

Salah satu keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi dari masyarakat setempat secara aktif (Carlo, 2017). Setiap partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan mereka dalam upaya bagaimana merencanakan (menyiapkan), mengantisipasi, dan melakukan sesuatu yang sudah direncanakan kemudian dilaksanakan dengan baik sehingga ketika terjadi bencana mereka sudah siap dengan ketangguhan yang dimilikinya yang pada akhirnya “daya lenting” mereka menjadi *survive* dalam menghadapi setiap bencana.

Kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat akan terwujud dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko, dan peningkatan kapasitas sewaktu masa pemulihan pasca bencana. Proses mewujudkan kemampuan dan kapasitas tersebut tidak dapat dilakukan satu atau dua kali saja, tetapi dilakukan berulang-ulang dan berkesinambungan. Tentu saja proses demikian memerlukan biaya yang cukup. Tanpa biaya yang memadai target program pemberdayaan masyarakat untuk menjadi tangguh sulit tercapai.

Masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam melakukan kajian secara bersama, menganalisis, merencanakan, melaksanakan dan, menangani, memantau, mengevaluasi serta dapat mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki secara keberkelanjutan. Pembiayaan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi tangguh terhadap bencana dapat dialokasi dari dana desa sebagaimana diamanatkan oleh UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya sesuai dengan Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta Pemendagri yang sesuai.

Kebijakan lain yang perlu diperkuat adalah melakukan kajian lingkungan hidup strategis pada setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang akan dilakukan sehingga sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Membuat studi analisis mengenai dampak lingkungan bagi setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting. Melakukan sinergisitas antar pemangku kepentingan akan mempercepat terwujudnya masyarakat tangguh dan tujuan pembangunan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa. Itulah pembangunan yang menyelamatkan.

## **6. Simpulan**

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-

kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Inti dari pemberdayaan adalah sebagai upaya terencana yang didesain untuk merubah atau melakukan pembaharuan pada suatu komunitas atau masyarakat dari yang tadinya tidak berdaya menjadi lebih berdaya serta mampu mandiri dengan peningkatan potensi dan kapasitas yang dimiliki.

Kapasitas berhubungan dengan istilah ketangguhan atau sering disebutkan Prof. Syamsul Maarif, Kepala BNPB 2008-2015, sebagai “daya lenting” atau kemampuan untuk kembali kepada keadaan semula. Masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana, akan menerima dampak bencana lebih besar dari pada daerah yang tidak rawan bencana. Oleh sebab perlu diberdayakan sehingga mereka menjadi tangguh. Tangguh yang berarti mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula sebelum bencana terjadi pada kehidupan normal secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menjadi masyarakat yang tangguh berarti telah memiliki kemampuan menggunakan sumber daya yang ada untuk mengelola ancaman dan kerentanan yang dimiliki. Pada akhirnya akan dapat mengurangi risiko bencana. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana merupakan perubahan dalam “*main set*” dari masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu dengan ancaman dan potensi bencana yang berada pada lingkungan mereka. Pengetahuan tersebut akan meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka menjadi peduli dan ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ada.

Peningkatan kapasitas masyarakat ini secara langsung atau tidak langsung akan mengurangi risiko bencana karena masyarakat telah siap mengantisipasi setiap ancaman dan potensi bencana yang mengancam diri mereka. Kesiapan masyarakat tersebut pada beberapa program pemberdayaan pengurangan risiko bencana dapat diukur berdasarkan aktivitas dan partisipasi yang dilakukan masyarakat tersebut.

## Daftar Pustaka

- Benson, C., Twigg, J. (2007). Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction: Guidance Notes for Development Organisations. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies/ the ProVention Consortium, Geneva, Switzerland. [http://www.proventionconsortium.org/mainstreaming\\_tools](http://www.proventionconsortium.org/mainstreaming_tools) [Diakses 20 Juli 2017].
- BNPB (2014). *Indek Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- BNPB (2016). *RBI (Risiko Bencana Indonesia)*. Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana.
- Budianto, W. (2017). *Studi Kesiapan Masyarakat Nagari Batu Bajaran Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Sebagai Nagari Tangguh Bencana*. Tesis Magister Teknik Sipil Universitas Bung Hatta Padang.
- Carlo, N., Septe, E., Yanti, Y. (2015). Partisipasi Masyarakat Nagari Batu Bajaran Menuju Nagari Tangguh Bencana. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 1, (1): 68-76.
- Carlo, N., Budianto, W., Rita, E. (2016). Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat Nagari Batu Bajaran Menuju Nagari Tangguh Bencana. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 2 (1): 324-331.
- Carlo, N. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat pada Daerah Rawan Bencana guna Mengurangi Risiko Bencana dalam rangka Ketahanan Nasional*. Taskap Program Pendidikan Singkat Angkatan XXI tahun 2017 Lemhannas RI.
- Data Informasi Bencana Indonesia Tahun 2005-2015. <http://dibi.bnpb.go.id>. [Diakses 31 Juli 2017].
- Forum 2045 (2021). *Kerangka Acuan Simposium Nasional “Memajukan Kesejahteraan Umum*.
- Maarif, S. (2019). *MPBBK. Kuliah Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas pada Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta*.
- Paripurno, E.T., Nugroho, A.R.B. (2016). *Praktik Baik Penguatan Komunitas untuk Pengelolaan Risiko Bencana Erupsi G. Kelut Jawa Timur, Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Lokal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*.
- Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.  
Peraturan Kepala BNPB nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.  
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.  
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.  
United Nations Inter-Agency Secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR) (2004). Living With Risk, A Global Review of Disaster Reduction Initiatives. Genewa, [https://www.unisdr.org/files/657\\_lwr1.pdf](https://www.unisdr.org/files/657_lwr1.pdf). [Diakses 5 Agustus 2019]  
Yusfida, I. (2014). Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Rawan Bencana di Indonesia (Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.